

Menteri Hanif Janji Akan Kaji Tuntutan Para Buruh di May Day

Reporter: **Vindry Florentin**

Editor: **Ninis Chairunnisa**

Rabu, 2 Mei 2018 09:35 WIB



Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko (kanan) dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri (kiri) memberi keterangan terkait polemik Peraturan Presiden tentang Pengaturan Tenaga Kerja Asing di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 24 April 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menemui para buruh yang mewakili berbagai elemen dan organisasi buruh dan pekerja pada peringatan Hari Buruh atau [May Day](#) 1 Mei 2018. Setidaknya, mereka menemui perwakilan dua kelompok buruh di Istana Kepresidenan.

Perwakilan kelompok buruh pertama yang diterima adalah Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) Rieke Dyah Pitaloka. "Mereka membuat lima maklumat pekerja untuk disampaikan kepada Presiden Jokowi," ujar Moeldoko seperti dilansir keterangan tertulis pada Selasa, 1 Mei 2018.

Maklumat itu antara lain berisi desakan untuk membentuk badan riset nasional tentang cetak biru industri di Indonesia, mewujudkan upah yang layak dan perlindungan terhadap tenaga kerja, dan meminta Menteri Tenaga Kerja lebih ketat dalam membuat aturan tentang tenaga kerja asing. Para buruh juga mendesak pemerintah menurunkan komite pengawas tenaga kerja serta mengangkat para tenaga honorer yang telah bekerja bertahun-tahun untuk menjadi pegawai negeri sipil.

Baca: [Didukung Buruh, Prabowo Bicara Soal Ketimpangan Kekayaan](#)

Moeldoko menuturkan, mereka juga memberi mandat kepada Presiden Joko Widodo untuk menyelamatkan aset negara. Presiden diminta mengelola BUMN sesuai dengan mandat konstitusi yakni untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kelima butir maklumat yang tertuang dalam selebar kertas tersebut kemudian diserahkan Rieke kepada Menteri Hanif untuk diteruskan kepada Presiden Jokowi. Hanif pun berjanji meneruskannya kepada Presiden.

Perwakilan kelompok buruh lain yang diterima adalah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang dipimpin oleh Presiden KSBSI Mudhofir Khamid dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang dipimpin Almansyur DD dan Hermanto.

Baca: [Pemerintah Diminta Buka MoU dengan Cina soal Tenaga Kerja](#)

Pertemuan itu sempat menyingung soal Peraturan Presiden tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). KSBSI menilai tidak ada yang salah dari Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 itu, namun implementasinya dinilai tak tepat.

"Perpres itu melindungi tenaga kerja Indonesia. Hanya saja, waktunya tidak tepat karena bersamaan dengan tahun politik," ujar Mudhofir. Perpres itu kemudian menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dan dimanfaatkan oleh berbagai kelompok.

Moeldoko dan Hanif juga menerima tuntutan kelompok buruh tersebut. Tuntutannya antara lain pelibatan asosiasi dan konfederasi buruh/pekerja dalam setiap kebijakan pemerintah menyangkut perburuhan, perubahan upah minimum dan kebijakan upah yang berpihak kepada pekerja, serta pengetatan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja.

Baca: [Tonggak Hari Buruh Berawal di Haymarket, Chicago 132 Tahun Silam](#)

Dalam kesempatan itu, Moeldoko menjelaskan kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah berfokus untuk pembangunan sumber daya manusia, termasuk pekerja. Pemerintah telah mendorong program vokasi supaya tenaga kerja Indonesia kita lebih kuat di keterampilan, terutama di era teknologi dan digitalisasi seperti sekarang ini.

Terkait dengan Perpres, Moeldoko berpesan khusus. "Jangan bilang konon, saya dengar...Tolong dibaca dengan baik Perpres itu. Spiritnya melindungi pekerja Indonesia," kata dia.

Sementara itu, Hanif mengatakan pihaknya berencana untuk membentuk satuan tugas yang bertanggung jawab mengawasi penggunaan tenaga kerja asing di wilayah Republik Indonesia.

Di luar segala tuntutan para buruh itu, Hanif mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan kelompok buruh dan serikat pekerja yang turun ke jalan dan mampu menjaga situasi secara kondusif, aman, dan damai. Terkait tuntutan para pekerja, Hanif berjanji pemerintah akan melakukan kajian yang mendalam.

Baca: [Demo May Day, PKS Tuntut Pencabutan Perpres Tenaga Kerja Asing](#)